



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 91037 Tlx. 227764
JEPARA 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 180 / 6 / K5 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Jepara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n BUPATI JEPARA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 180 / 6 / Ks Tahun 2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TAHUN 2025

NO	SKPD PENGUSUL	JENIS	TENTANG	STATUS		DASAR PELAKSANAAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		
1.	DISDUKCAPIL	Perbup	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan 4. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	
2.	DISHUB	Perbup	1. Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	baru	-	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
			2. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan Jepara	baru	-	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	

						3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;	
			3. Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Perdesaan dan Perkotaan Kelas Ekonomi Kabupaten Jepara	baru		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.	
			4. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	baru		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.	
			5. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjau pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa	baru		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan	
			6. Peraturan Bupati Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor	Baru		1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	

3.	DINSOSPERMASDES	Perbup	1. Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
			2. Pengelolaan Dana Desa	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
			3. Pedoman Penyusunan APBDesa	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	
			4. Pengelolaan Aset Desa	Baru		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	
			5. Pedoman Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa	Baru		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
			6. Penyandang Disabilitas	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.	

			7. Jaring Pengaman Sosial	Baru		1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	
			8. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Jepara Tahun 2025	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
4.	BAGIAN ORGANISASI	Perbup	1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Pada Perangkat Daerah.	-	ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri 12/2017 tentang pedoman pembentukan & klasifikasi cabang dinas dan UPTD	
			2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPUPR	-	ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil, pemetaan dan pedoman organisasi perangkat daerah bidang pertanahan 3. Permendagri Nomor 106 No 2017 tentang Pedoman nomenklatur PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang PUPR	
			3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja SatpolPP & Damkar	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	
			4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bapperida	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten	

						Jepara; 3. Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, pembentukan dan nomenklatur BRIDA	
			5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Bakesbangpol	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;	
			6. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Permen PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang pedoman Evaluasi Jabatan 4. Permen PANRB Nomor 656 tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah	
			7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Permen Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;	
			8. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,	-	Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	

			Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati.			2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah	
			9. Tambahan Penghasilan Pegawai	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Kepmendagri No 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Mendagri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemda	
			10. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah dinas di Lingkungan Pemda	
			11. Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Perpres No 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN	
			12. Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	

						2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Permendagri Nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	
			13. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB.	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	
			14. Standar Kompetensi Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.	baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara; 3. Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.	
5.	DISPERKIM	Perbup	1. Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Baru	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; dan	

						3. Perda No 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana , Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.	
			2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kabupaten Jepara	Baru	-	1. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	
			3. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Baru	-	1. Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KB) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	
6.	BPKAD	Perbup	1. Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	
			2. Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional	
			3. Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2026 (beserta perubahannya)	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	

			4. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.	
			5. Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jepara. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional	
			7. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024	Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	
			8. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	
			9. Petunjuk Pemungutan Pajak Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 22 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			10. Petunjuk Pemungutan Retribusi Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 22 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	

						3. Peratarun Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	
			11. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			12. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA.2025 (beserta perubahannya)		ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			15. Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2025	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			16. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2024 (beserta perubahannya)		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			17. Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD TA.2026	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			18. Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			19. Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyusunan, Persetujuan dan pengesahan DPA dan pembayaran atas beban APBD	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	
			20. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2025	

			21. Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi PNS dan Non PNS	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PMK 119 th 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	
			22. Bagan Akun Standar	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
7.	DPUPR	Perbup	1. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Welahan	Baru		1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043	
			2. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mlonggo	Baru		1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043	
			3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Baru		1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043	
			4. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Baru		1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043	
8.	DP3AP2KB	Perbup	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa	-	ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan	

						Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011	
9.	BKD	Perbup	1. Pendelegasian Sebagian Wewenang Menandatangani Keputusan Di Bidang Kepegawaian	Baru		Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	
			2. Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara	Baru		Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	
			3. Pedoman Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara	Baru		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	
10.	Bagian Pemerintahan	Perbup	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Perbup	Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administratif kepada Kepala DLH.	Baru		Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
12	Bappeda	Perbup	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
			2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah	

						diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
			3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
			4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
			5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah	
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perbup	1. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Baru		1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	

			2. Kode Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	
14.	RSUD RA Kartini	Perbup	1. Peraturan Internal RSUD RA Kartini	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
			2. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Kartini.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
15.	Bagian Perekonomian	Perbup	1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;	
			2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;	

			3. Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo			1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;	
--	--	--	--	--	--	--	--

a.n. BUPATI JEPARA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO